

Pengaruh Komisaris Independen dan Pengungkapan Sukarela terhadap Kinerja Perusahaan

Tri Siwi Nugrahani dan Fajar Agus Nugroho¹
Universitas PGRI Yogyakarta

Effect of Independence Commissioner and Voluntary Disclosure on Financial Performance

ABSTRACT *This study aims to examine the effect of independence commissioner and voluntary disclosure to financial performance. Sample consisted of 71 manufacture industries wich are listed in Indonesian Stock Exchange and perform annual report from 2005 -2008. This study used purposive sampling to collect the data and used regression linier to test hypothesis. Results showed that independence commissioner had positive effect to financial performance but voluntary disclosure didn't have effect to financial performance.*

Keywords: *independence commissioner, voluntary disclosure, financial performance.*

Pelaksanaan *good corporate governance* merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pemilik karena menunjukkan transparansi perusahaan yang dilakukan dengan mengungkapkan laporan keuangan yang merupakan sarana komunikasi antara pengelola dengan pemilik. Selain itu laporan keuangan dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan kepada pemilik. Pengungkapan ini dapat berfungsi untuk mengatasi masalah keagenan karena memberi informasi tentang kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari pengungkapan, apabila manfaat yang akan diperoleh dengan pengungkapan informasi tersebut lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan maka perusahaan akan mengungkapkan informasi tersebut.

Menurut Zarkasy (2008) beberapa perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya melakukan pengelolaan secara profesional karena terdapat konsentrasi pemilikan pihak tertentu yang memungkinkan terjadinya afiliasi antar pemilik, pengawas dan pengelola. DuCharme dkk. (2000) dalam Hastuti (2005) mengatakan pemilik tidak memiliki sumber akses yang memadai untuk memperoleh informasi memonitor tindakan manajemen. Berkaitan dengan hal tersebut, fungsi komisaris sebagai pengawas sangat diperlukan untuk mengatasi masalah keagenan tersebut. Dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer (Siddharta dan Afriani, 2005).

Untuk menjaga independensi dan keseimbangan pengambilan keputusan agar tidak merugikan kepentingan pihak lain diperlukan komisaris independen dalam keanggotaan

dewan komisaris. Wedari (2004) mengatakan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan mempunyai jumlah dewan komisaris independen yang lebih rendah daripada perusahaan yang tidak melakukan kecurangan. Hal tersebut terjadi karena komisaris perusahaan di Indonesia tidak melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap manajemen yang mempunyai hubungan istimewa (kekeluargaan) dengan direksi maupun dengan manajemen perusahaan. Peran komisaris independen yang berfungsi sebagai wakil pemegang saham khususnya dan *stakeholders* lainnya diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut sehingga para pemegang kepentingan juga terlindungi. Komisaris independen akan mampu mendorong terciptanya keadilan dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan. Hal ini juga mendorong diterapkannya prinsip dan praktek *good corporate governance* pada perusahaan. Dewan komisaris menjadi salah satu ukuran untuk mengetahui apakah perusahaan sudah melakukan *good corporate governance* atau belum.

Perusahaan dapat memberikan pengungkapan informasi melalui laporan tahunan yang telah diatur oleh Bapepam (*mandatory disclosure*), maupun melalui pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan sukarela merupakan bagian dari pengungkapan nonfinansial yang diharapkan dapat membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan. Menurut Siddharta dan Istini (2000), pengungkapan informasi nonfinansial bagi *stakeholders* sangat penting karena adanya keterbatasan pengukuran finansial. Informasi pengungkapan sukarela diharapkan dapat menjelaskan resiko yang mungkin dapat diminimalisir maupun kemungkinan *return* yang akan diperoleh oleh investor. Pengungkapan ini akan memberikan informasi lebih tentang perusahaan kepada pasar yang mencerminkan nilai perusahaan.

Beberapa studi pendahulu yang berkaitan dengan *good corporate governance*, *voluntary disclosure*, dan kinerja perusahaan sudah dilakukan diantaranya oleh Black, Jang, & Kim (2002) yang menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* (GCG) dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Darmawati, Khomsiyah, & Rahayu (2005) mengukur GCG dengan menggunakan *Corporate Governance Indeks* yang dikeluarkan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan hasil GCG secara signifikan dapat meningkatkan *return on equity* (ROE), sedangkan menurut Mitton (2002) variabel yang berkaitan dengan GCG mempunyai dampak yang kuat dengan kinerja perusahaan. Hastuti (2005) menguji kinerja perusahaan dengan *mandatory disclosure* tetapi tidak menghubungkan dengan *voluntary disclosure*, sedangkan Murni (2003) menguji *voluntary disclosure* untuk mengukur *cost of equity capital* atau kompensasi yang harus diberikan kepada investor.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh *good corporate governance* yang diprosikan dengan komisaris independen dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) terhadap kinerja perusahaan. Berkaitan dengan penerapan *good corporate governance* yang ditunjukkan dengan komisaris independen dan pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan akan memungkinkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan, terutama kinerja keuangan.

Komisaris Independen sebagai Mekanisme Good Corporate Governance

Masalah keagenan berhubungan dengan bagaimana dana yang ditanamkan akan mendatangkan keuntungan dan memastikan bahwa manajer tidak memaksimalkan laba untuk kepentingan sendiri yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham lainnya. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Salah satu upaya untuk mendorong mekanisme yang mampu menjamin agar manajemen dapat mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan pemilik yaitu dengan pelaksanaan *good corporate governance*.

Prinsip-prinsip *good corporate governance* menunjukkan perlindungan terhadap pemegang saham dan seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan termasuk masyarakat. Menurut Bakrie (2000), *good corporate governance* adalah sistem di mana entitas usaha dikelola dan diawasi, sehingga berkaitan dengan distribusi hak dan kewajiban bagi pemegang saham/komisaris/investor, kreditur/direksi dan manager/pemerintah. *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar yang berkaitan erat dengan kepercayaan terhadap perusahaan yang melaksanakan maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. *Good Corporate Governance* merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau *return* dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer (KNKG, 2006)..

Menurut Zarkasyi (2008) GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem (*input*, proses, dan *output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

Penerapan *good corporate governance* tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kedudukan manajemen/direksi dan komisaris perusahaan. Utomo (2000) mengemukakan bahwa di Indonesia ketentuan mengenai kedudukan direksi dan komisaris diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam UU tersebut, kedudukan direksi dan komisaris secara tegas dipisahkan sehingga dapat dikatakan bahwa sistem yang dianut adalah *two-tier board system* yaitu sistem dua badan yang terdiri dari Dewan komisaris sebagai pengawas dan Direksi sebagai pengelola perusahaan. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan jangka panjang.

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada direksi serta memastikan bahwa manajemen perusahaan telah melaksanakan tata kelola yang baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006), dewan komisaris terdiri dari komisaris yang berasal dari pihak yang terafiliasi internal dan eksternal yang disebut komisaris independen. Komisaris terafiliasi adalah komisaris yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan anggota komisaris lain, serta perusahaan itu sendiri. Mantan anggota direksi dan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi. Sedangkan komisaris independen adalah komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan komisaris serta perusahaan itu sendiri yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan agar keputusan perusahaan dapat diambil secara efektif, tepat, dan independen.

Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure)

Transparansi merupakan salah satu penerapan *good corporate governance*. Transparansi dapat dilakukan dengan pengungkapan informasi. Perusahaan mengungkapkan laporan tahunan seperti yang telah diatur oleh Bapepam nomor Kep-38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996. Pengungkapan terdiri dua jenis, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan

item-item pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Walaupun bersifat sukarela, pengungkapan ini akan berdampak positif bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan di pasar modal. Suropto (1998) mengemukakan pengungkapan sukarela yang lebih luas merupakan salah satu cara manajer untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Pengungkapan sukarela dapat membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan. Kebijakan pengungkapan informasi yang rendah justru akan mengindikasikan manajemen perusahaan belum mengelola perusahaan dengan baik.

Menurut Djoko dan Kasmadi (2004) manajemen memiliki insentif untuk menyediakan pengungkapan sukarela. Perusahaan yang terdaftar di pasar modal menghadapi persaingan dengan perusahaan lain dalam hal jenis sekuritas, termin, dan return yang ditawarkan. Para investor juga menghadapi ketidakpastian dana yang ditanamkan maupun ketidakpastian mengenai kualitas dan keamanan surat berharga yang ditawarkan oleh perusahaan. Investor atau pemilik perusahaan membutuhkan informasi untuk menaksir ketidakpastian aliran kas di masa yang akan datang untuk dapat digunakan dalam menilai saham perusahaan. Pengungkapan sukarela diharapkan dapat menjelaskan *return* yang diperoleh maupun resiko yang dapat diminimalisir.

Kinerja Perusahaan

Kinerja dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai perusahaan pada periode tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja dengan menggunakan tenaga, kinerja perusahaan merupakan hasil yang dicapai manajemen dalam menerapkan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan.

Laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk menilai kinerja perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang dijadikan keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Laporan keuangan tersebut bermanfaat untuk membantu investor, kreditor, calon investor dan para pengguna lainnya dalam rangka membuat keputusan investasi, keputusan kredit, analisis saham serta menentukan prospek suatu perusahaan di masa yang akan datang. Dengan membandingkan data dalam laporan rugi laba (rasio keuangan) dapat diketahui kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.

Studi ini menggunakan rasio profitabilitas yaitu *return on equity* (ROE) sebagai ukuran kinerja perusahaan. ROE merupakan tingkat pengembalian ekuitas untuk melihat efektifitas manajemen dari hasil kebijakan pendanaan yang telah dibuat perusahaan. ROE membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan ekuitas yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Rasio ini memberitahukan kemampuan menghasilkan laba pada nilai buku investasi pemegang saham dan sering digunakan dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan dalam industri. Pengembalian ekuitas yang tinggi dapat merefleksikan penerimaan perusahaan atas kesempatan investasi yang kuat dan manajemen biaya yang efektif.

Hubungan Komisaris Independen, Pengungkapan Sukarela dan Kinerja Perusahaan

Setiap organ perusahaan harus dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Hal serupa berlaku juga bagi komisaris, terlebih mereka yang berada pada struktur perusahaan bersama direksi/manajemen puncak. Komisaris independen diharapkan dapat mendorong pencapaian tujuan dan

sasaran bisnis organisai sejalan dengan visi, misi, dan strategi perusahaan. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan agar mekanisme pengawasan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Wedari (2004) perusahaan yang melakukan kecurangan mempunyai jumlah komisaris independen yang rendah. Komisaris menjaga agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan mendorong diterapkannya praktek tata kelola yang baik. Hal ini berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dan keadilan karena dalam *good corporate governance* memperhitungkan semua pemegang kepentingan. Akuntabilitas dan keadilan merupakan prasyarat dalam mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja, manajemen melakukan pengungkapan yang merupakan salah satu alat penting untuk mengatasi masalah keagenan antara manajemen dan pemilik karena dipandang sebagai upaya untuk mengurangi asimetri informasi. Perusahaan mengungkapkan melalui laporan tahunan yang telah diatur oleh Bapepam baik pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) maupun pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) sebagai tambahan pengungkapan minimum yang telah ditetapkan.

Pengungkapan merupakan upaya dalam meningkatkan transparansi dan menjamin perlindungan terhadap investor. Setiap perusahaan yang menawarkan sahamnya melalui pasar modal (emiten) wajib mengungkapkan seluruh informasi mengenai keadaan usahanya termasuk keadaan keuangan, aspek hukum, manajemen, dan harta kekayaan perusahaan terhadap masyarakat. Pengungkapan sukarela yang lebih luas akan meningkatkan kredibilitas perusahaan dan bukti bahwa manajemen telah menghasilkan kinerja yang baik bagi perusahaan.

Fungsi pengawasan dan nasehat yang diberikan komisaris independen dilakukan untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan perusahaan.

H1.

Komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Pengungkapan sukarela dapat membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan. Pengungkapan yang lebih luas akan menarik banyak analis, meningkatkan akurasi ekspektasi pasar, dan menurunkan ketidaksimetrisan pasar. Walaupun bersifat sukarela, pengungkapan dapat dilihat sebagai suatu sinyal dari manajemen kepada investor/ bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik. Pengungkapan ini digunakan untuk memberitahu investor bahwa manajemen telah berusaha mengurangi perilaku oportunistik mereka. Perusahaan yang mengungkapkan informasi lebih banyak kepada pihak luar diduga memiliki kinerja perusahaan yang lebih baik karena pasar akan memberikan penilaian yang positif.

H2.

Pengungkapan sukarela berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan

Metode Penelitian

Sampel

Subyek penelitian adalah perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2005-2008. Sampel penelitian menggunakan teknik *purposive*

sampling dengan kriteria; setiap subyek menerbitkan laporan tahunan perusahaan yang berakhir 31 Desember dan mengungkapkan data komisaris perusahaan dan pengungkapan sukarela dengan sampel 71 perusahaan.

Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan tahunan perusahaan tahun 2005-2008 dan *Indonesian Capital Market Directory* tahun 2005-2008. Data komisaris independen dan pengungkapan sukarela diambil dari laporan tahunan perusahaan. Data tentang kinerja perusahaan yang diukur dengan nilai *return on equity* (ROE) diambil dari *Indonesian Capital Market Directory* tahun 2006-2008.

Pengukuran Variabel

Komisaris Independen diukur dengan jumlah komisaris independen yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan anggota komisaris lain serta perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Pengukuran komisaris independen dilakukan dengan menghitung proporsi komisaris independen yaitu, membagi jumlah komisaris independen dengan total anggota komisaris.

Pengungkapan Sukarela yaitu pengungkapan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Pengungkapan Sukarela diukur berdasarkan informasi laporan tahunan dengan melihat 33 item dari daftar butir pengungkapan sukarela yang telah dilakukan oleh Surtanto (1998) dan Nugrahani (2009). Pengukuran tiap item dilakukan dengan memberi angka 1 jika terdapat pengungkapan dan angka 0 jika tidak terdapat pengungkapan. Kemudian 33 item *voluntary disclosure* dijumlahkan untuk setiap perusahaan dan dilakukan penilaian indeks kelengkapan *voluntary disclosure* dengan membandingkan jumlah item yang diungkapkan perusahaan dengan jumlah semua daftar item.

Kinerja Perusahaan diukur dengan *return on equity* (ROE) yaitu kemampuan perusahaan dalam menggunakan modalnya dalam menghasilkan laba.

Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Adapun rumus regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = ROE sebagai ukuran dari kinerja perusahaan

X1 = Proporsi komisaris independen sebagai ukuran dari GCG

X2 = Indeks *voluntary disclosure*

a = Konstanta

β_1 = Koefisien proporsi komisaris independen

β_2 = Koefisien indeks *voluntary disclosure*

ϵ = *Error term*

Hasil

Statistik Deskriptif dan Korelasi

Studi ini menggunakan subyek penelitian perusahaan makanan dan minuman tahun 2005-2008. Sampel penelitian terdiri 71 perusahaan. Statistik deskriptif dan korelasi bisa dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif dan Korelasi

Variabel	Min	Maks	Rata-rata	Std. Deviasi	(1)	(2)	(3)
Komisaris Independen (1)	0,000	0,667	0,325	0,138	-		
Pengungkapan Sukarela (2)	0,242	0,485	0,356	0,059	-0,038	-	
Kinerja Perusahaan (3)	-0,594	3,637	0,217	0,544	-0,294*	0,071	-

Keterangan: * signifikan pada $\alpha \leq 0,05$.

Tabel 1 menunjukkan nilai rata-rata komisaris independen, pengungkapan sukarela, dan kinerja perusahaan. Variabel komisaris independen berkisar antara 0,000 dan 0,667 dengan rata-rata 0,325. Nilai ini diperoleh dari perbandingan jumlah komisaris independen dengan jumlah semua komisaris. Nilai minimum sebesar 0,000 hal ini berarti terdapat perusahaan sampel yang belum memiliki komisaris independen. Sementara nilai berdasarkan peraturan dari BEI yang menetapkan batas minimal proporsi dewan komisaris independen sebesar 30% dan dibandingkan dengan nilai rata-rata 0,325 atau 32,5% mengindikasikan proporsi komisaris independen rata-rata perusahaan sampel sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Variabel pengungkapan sukarela diukur dengan nilai indeks *voluntary disclosure* yang diperoleh dari membandingkan jumlah item yang diungkapkan perusahaan dengan jumlah semua daftar item *voluntary disclosure*. Nilai maksimum 0,485 mengindikasikan bahwa perusahaan sampel masih sedikit dalam melakukan pengungkapan sukarela. Hal ini mungkin disebabkan besarnya biaya untuk melakukan *disclosure* dibandingkan manfaat yang diperoleh. Nilai rata-rata untuk pengungkapan sukarela adalah 0,354.

Kinerja perusahaan yang diukur dengan *return on equity* (ROE) berkisar antara -0,594 dan 3,637 dengan nilai rata-rata 0,217. Hal ini mengindikasikan perusahaan mampu menghasilkan kinerja cukup baik bagi pemegang saham.

Tabel 1 juga menunjukkan antara variabel Komisaris Independen dengan Pengungkapan Sukarela tidak terdapat korelasi yang signifikan dengan tingkat signifikansi 0,775. Demikian pula antara Pengungkapan Sukarela dengan Kinerja Perusahaan tidak terdapat korelasi, namun antara Komisaris Independen dengan Kinerja Perusahaan terdapat korelasi yang signifikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Komisaris Independen dan Kinerja Perusahaan saling berhubungan, tetapi antara Komisaris Independen dengan pengungkapan sukarela dan antara kinerja perusahaan dengan pengungkapan sukarela tidak berhubungan.

Pengujian Hipotesis

Hipotesis diuji dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil pengujian bisa dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Variabel Independent	Koefisien Regresi	Standar Error	t	p-value
Konstanta	0,038	0,416	0,091	0,927
Komisaris Independen	1,152	0,457	2,520	0,014*
Pengungkapan Sukarela	-0,549	1,062	-0,517	0,607
R	0,090			
R square	0,063			
F	30,362			0,041*

Variabel dependen: Kinerja Perusahaan

Keterangan: * signifikan pada $\alpha \leq 0,05$.

Nilai F sebesar 3,362 dan signifikan pada α 5% artinya ada hubungan linier antara variabel komisaris independen dan pengungkapan sukarela dengan kinerja perusahaan (model sudah fit). Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,090 artinya 9% variabel kinerja perusahaan dijelaskan oleh variabel komisaris independen dan pengungkapan sukarela sedangkan sisanya 91% dijelaskan oleh variabel-variabel lain atau variabel komisaris independen dan pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sebesar 9%. Sedangkan *Standar Error of Estimate* sebesar 0,526 berarti kesalahan model dalam memprediksi kinerja perusahaan sebesar 0,526.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis seperti yang terlihat pada Tabel 2 diperoleh nilai t variable komisaris independen sebesar 2,520 dengan *p value* 0,014 yang berarti hipotesis 1 didukung karena menunjukkan *p value* < 5% dengan arah positif. Tabel 2 menunjukkan nilai t variable pengungkapan sukarela sebesar -0,517 dengan *p value* 0,607. Karena *p value* variabel pengungkapan sukarela tidak signifikan, maka tidak terdapat pengaruh pengungkapan sukarela terhadap kinerja perusahaan (hipotesis 2 tidak didukung).

Pembahasan

Variabel komisaris independen terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan *return on equity* (ROE). Hal ini mendukung teori yang diberikan bahwa fungsi pengawasan komisaris independen dapat mengurangi perilaku oportunistik direksi dan manajemen sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih efektif sesuai penelitian terdahulu yang dilakukan Darmawati *et al.* (2005) bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang ditunjukkan dengan komisaris independen dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Pengungkapan sukarela berpengaruh negative pada kinerja perusahaan, namun tidak signifikan. Apabila indeks pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) menurun, tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan tidak mendukung hipotesis 2 dan kurang mendukung teori bahwa pengungkapan sukarela yang luas merupakan bukti bahwa manajemen telah menghasilkan kinerja yang baik dan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena perusahaan yang melakukan pengungkapan sukarela relatif masih sedikit, dan kemungkinan perusahaan masih mempertimbangkan biaya untuk melakukan pengungkapan sukarela lebih besar daripada manfaat yang diberikan.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini terbatas pada sampel perusahaan manufaktur makanan dan minuman, sehingga kemungkinan apabila diterapkan pada perusahaan manufaktur dengan jenis yang berbeda maka akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian berkelanjutan pada perusahaan manufaktur dengan bidang yang berbeda untuk menguji apakah hasil penelitian konsisten atau tidak. Selain itu akan lebih lengkap lagi apabila struktur kepemilikan ikut diuji untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh atau tidak struktur kepemilikan pada kinerja perusahaan.

Simpulan

Penelitian ini menguji pengaruh komisaris independen dan pengungkapan sukarela terhadap kinerja perusahaan. Berdasar hasil korelasi antar variabel menunjukkan terdapat hubungan antara variabel komisaris independen dengan kinerja perusahaan. Nilai R^2 sebesar 0.090 berarti 9% variabel kinerja perusahaan dijelaskan secara simultan oleh variabel komisaris independen dan pengungkapan sukarela, sisanya yaitu 91% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Berdasar hasil uji hipotesis menunjukkan variabel komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dibuktikan dengan arah positif dan nilai p value $0,014 < 0,05$ yang berarti angka tersebut signifikan. Hal ini mendukung teori bahwa fungsi pengawasan komisaris independen dapat mengurangi perilaku oportunistik direksi dan manajemen sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Nilai rata-rata proporsi sebesar 32,5% menunjukkan bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan Bapepam tentang jumlah minimal proporsi komisaris independen sebesar 30% dari jumlah semua komisaris.

Variabel pengungkapan sukarela tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Walaupun arahnya negatif tetapi nilai p value $0,607 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berbeda dengan teori karena pengungkapan sukarela yang luas akan meningkatkan kredibilitas perusahaan dan membuktikan bahwa perusahaan telah menghasilkan kinerja yang baik.

Penulis

Dra. Tri Siwi Nugrahani, MSi, adalah staf pengajar Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Yogyakarta. Fajar Agus Nugroho adalah alumni dari Fakultas Ekonomi universitas yang sama.

Referensi

Bakrie, A. (2000). Good Corporate Governance : Sudut Pandang Pengusaha. *Jurnal Reformasi Ekonomi*, 1 (2).

- Black B., Jang, H., & Kim, W. (2002). *Does Corporate Governance Predict Firm's Market Values?* Working Paper, Evidence from Korea. [on-line] diunduh pada tanggal 18 April 2009 di <http://www.ssrn.com>.
- Darmawati, D., Khomsiyah, & Rahayu, R. G. (2005). Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 8 (1): 65 – 81.
- Djoko, S., & Kasmadi (2004). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan-perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*.
- Hastuti (2005). *Hubungan Antara Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan dengan Kinerja Keuangan*, Prosiding Seminar Nasional Akuntansi VIII: 238-247.
- Jensen, M. & Meckling, W. H. (1976). Theory of Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*, 3 (4): 305-360.
- KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance). (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Mitton, T. (2002). A Cross-Firm Analysis of the Impact of Corporate Governance on the East Asian Financial Crisis. *Journal of Financial Financial Economic*. [on-line] diunduh pada tanggal 18 April 2009 di <http://www.ssrn.com>.
- Murni, S. A. (2003). Pengaruh Luas Ungkapan Sukarela dan Asimetri Informasi terhadap Cost of Equity Capital pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi VI*: 316-327.
- Nugrahani, T. S. (2009). Perbedaan Karakteristik Perusahaan High and Low Profile pada Pengungkapan Sukarela, Tanggung Jawab Sosial, Likuiditas, Solvabilitas, dan Size. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 3 (1): 49-71.
- Siddharta & Afriani, C. (Agustus 2005). *Praktek corporate Governance dan Penciptaan Nilai Perusahaan : Studi Empiris di BEJ*. Usahawan, XXXIV: 4-5.
- Siddharta & Istini, T. (2000). Pengungkapan Informasi Finansial dan Non Finansial dalam Pelaporan Keuangan. *Prosiding Konvensi Nasional Akuntansi IV*.
- Suripto. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan*, Tesis, tidak dipublikasikan. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1998.
- Utomo, M. (2000). Praktek Pengungkapan Sosial pada Laporan Tahunan Perusahaan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi III*: 99-122.
- Wedari, L. K. (2004). Analisis Pengaruh Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Audit terhadap Aktivitas Manajemen Laba. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi VII*: 963-974.
- Zarkasyi, M. W. (2008). *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.